

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018 - DK/TP/KD  
Wilayah Nusa Tenggara Barat (2300)  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016**



Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – Nusa Tenggara Barat  
Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)  
Jl. Raya Peninjauan, Narmada, Nusa Tenggara Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang juga merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), yaitu unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah kerjanya. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tingkat wilayah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat wilayah.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi periode yang berakhir 31 Desember 2016 dengan Kode Kewenangan DK/TP/KD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada -- Edit Melalui Konfigurasi --. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, 08 Februari 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Nusa Tenggara Barat

Dr. Ir. M. Saleh Mukhtar, MP  
NIP. 196607071991031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I	Laporan Realisasi Anggaran .....	1
II	Neraca.....	1
III	Laporan Operasional .....	1
IV	Laporan Perubahan Ekuitas .....	1
V	Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A	Penjelasan Umum .....	7
B	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1	Pendapatan .....	18
B.2	Belanja .....	18
B.2.1	Belanja Pegawai .....	19
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1	Aset Lancar	
C.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran .....	20
C.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan .....	20
C.1.3	Belanja di bayar dimuka.....	20
C.1.4	Persediaan .....	20
C.2	Aset Tetap	
C.2.1	Tanah .....	21
C.2.2	Peralatan dan Mesin .....	21
C.2.3	Gedung dan Bangunan .....	21
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	21
C.2.5	Aset Tetap Lainnya .....	21
C.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	22
C.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	22
C.3	Aset Lainnya	
C.3.1	Aset Tak Berwujud .....	22
C.3.2	Aset Lain-lain .....	22
C.3.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya .....	22

C.4	Kewajiban Jangka Pendek	
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga .....	23
C.4.2	Uang Muka dari KPPN .....	23
C.5	Ekuitas	
C.5.1	Ekuitas .....	23
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya .....	24
D.2	Beban Pegawai .....	24
D.3	Beban Persediaan .....	24
D.4	Beban Barang dan Jasa .....	24
D.5	Beban Pemeliharaan .....	25
D.6	Beban Perjalanan Dinas .....	25
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat .....	25
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	25
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional .....	26
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1	Ekuitas Awal .....	27
E.2	Surplus/Defisit-LO .....	27
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar .....	27
E.4	Koreksi Nilai Aset Tetap No reevaluasi .....	27
E.5	Penyesuaian Nilai Aset .....	27
E.6	Transaksi Antar Entitas .....	27
E.7	Ekuitas Akhir .....	27
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	28
F.2	Pengungkapan Lain-lain .....	28

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi periode yang berakhir 31 Desember 2016 dengan Kode Kewenangan DK/TP/KD ini terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 08 Februari 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Nusa Tenggara Barat

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP  
NIP. 196607071991031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi periode yang berakhir 31 Desember 2016 dengan Kode Kewenangan DK/TP/KD ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14,222,901,960. atau mencapai 1,117.04% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,273,265,000.00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp 716,594,965,830.00 atau mencapai 83.58% dari alokasi anggaran sebesar Rp857,330,372.00

### II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp63,819,309,140.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8,698,774,057.00; Aset Tetap sebesar Rp51,038,304,948.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya sebesar Rp5,187,755,938.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30,537,894,527.00 dan Rp49,846,992,855.00.

### III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2,051,188,735.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp739,661,203,840.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-720,340,317,929.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp8,035,245,290.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-729,539,632,439.00.

### IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp45,103,047,905.00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp1,220,026,535,393.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp506,065,519.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1,163,296,925,220.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp-12,127,128,787.00.

## **V Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KONSOLIDASI 018.2300 DK/TP/KD  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2016**

Uraian	DK		TP		KD		Total	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	167,310,000	543,109,008	-	11,861,672,381	1,105,955,000	1,818,120,571	1,273,265,000	14,222,901,960
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>167,310,000</b>	<b>543,109,008</b>	<b>-</b>	<b>11,861,672,381</b>	<b>1,105,955,000</b>	<b>1,818,120,571</b>	<b>1,273,265,000</b>	<b>14,222,901,960</b>
<b>BELANJA</b>								
<b>Belanja Operasi</b>								
Belanja Pegawai	-	-	-	-	16,353,890,000	16,318,734,871	16,353,890,000	16,318,734,871
Belanja Barang	87,035,336,000	69,639,659,163	725,243,766,000	604,435,316,960	24,449,537,000	22,088,393,915	836,728,639,000	696,163,370,038
Belanja Pegawai	-	-	-	-	4,247,843,000	4,112,860,921	4,247,843,000	4,112,860,921
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>87,035,336,000</b>	<b>69,639,659,163</b>	<b>725,243,766,000</b>	<b>604,435,316,960</b>	<b>45,051,270,000</b>	<b>42,519,989,707</b>	<b>857,330,372,000</b>	<b>716,594,965,830</b>

## II. NERACA

**KONSOLIDASI 018.2300 DK/TP/KD**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2016**

Uraian	DK	TP	KD	Total
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	150,000.00	-	150,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	4,352,776.00	4,352,776.00
Belanja dibayar dimuka	-	-	3,307,775.00	3,307,775.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00
Piutang bukan Pajak	35,533,326.00	-	-	35,533,326.00
Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak	(177,667.00)	(21,000,000.00)	-	(21,177,667.00)
Piutang bukan Pajak (netto)	35,355,659.00	-	-	35,355,659.00
Persediaan	4,593,209,388.00	466,000.00	4,061,932,459.00	8,655,607,847.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4,628,565,047.00</b>	<b>616,000.00</b>	<b>4,069,593,010.00</b>	<b>8,698,774,057.00</b>
<b>Aset Tetap</b>				
Tanah	4,129,561,000.00	-	3,312,330,940.00	7,441,891,940.00
Peralatan dan Mesin	23,123,095,309.00	3,511,194,500.00	21,539,408,940.00	48,173,698,749.00
Gedung dan Bangunan	8,794,343,721.00	811,749,500.00	24,467,926,994.00	34,074,020,215.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,492,376,611.00	3,631,676,207.00	1,712,810,487.00	8,836,863,305.00
Aset Tetap Lainnya	(4,077,603,625.00)	24,955,000.00	98,906,500.00	(3,953,742,125.00)
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	158,421,200.00	158,421,200.00
Akumulasi Penyusutan	(19,518,477,905.00)	(4,243,206,764.00)	(19,931,163,667.00)	(43,692,848,336.00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>15,943,295,111.00</b>	<b>3,736,368,443.00</b>	<b>31,358,641,394.00</b>	<b>51,038,304,948.00</b>
<b>Aset Lainnya</b>				
Aset Tak Berwujud	4,420,224.00	3,440,448.00	199,550,000.00	207,410,672.00
Aset Lain-lain	7,218,475,335.00	183,037,000.00	644,279,049.00	8,045,791,384.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,154,018,269.00)	(182,624,220.00)	(728,803,629.00)	(3,065,446,118.00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>5,068,877,290.00</b>	<b>3,853,228.00</b>	<b>115,025,420.00</b>	<b>5,187,755,938.00</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>25,640,737,448.00</b>	<b>2,635,311,868.00</b>	<b>35,543,259,824.00</b>	<b>63,819,309,140.00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
Utang kepada pihak ketiga	-	30,411,009,855.00	126,884,672.00	30,537,894,527.00
Uang Muka dari KPPN	-	150,000.00	-	150,000.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	30,411,009,855.00	126,884,672.00	30,537,894,527.00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>30,411,009,855.00</b>	<b>126,884,672.00</b>	<b>30,537,894,527.00</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	25,640,737,448.00	(11,210,120,539.00)	35,416,375,946.00	49,846,992,855.00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>25,640,737,448.00</b>	<b>(11,210,120,539.00)</b>	<b>35,416,375,946.00</b>	<b>49,846,992,855.00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>25,640,737,448.00</b>	<b>19,200,889,316.00</b>	<b>35,543,260,618.00</b>	<b>80,384,887,382.00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KONSOLIDASI 018.2300  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2016 dan 30 Desember 2015**

Uraian	DK	TP	KD	Total
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	180,050,355.00	102,054,933.00	1,769,083,447.00	2,051,188,735.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>180,050,355.00</b>	<b>102,054,933.00</b>	<b>1,769,083,447.00</b>	<b>2,051,188,735.00</b>
<b>BEBAN</b>	-	-	-	-
Beban Pegawai	-	-	16,367,096,471.00	16,367,096,471.00
Beban Persediaan	(4,124,323,788.00)	180,209,925.00	3,792,063,167.00	(152,050,696.00)
Beban Barang dan Jasa	50,801,792,158.00	298,006,614,915.00	7,272,045,769.00	356,080,452,842.00
Beban Pemeliharaan	25,770,350.00	-	2,078,636,120.00	2,104,406,470.00
Beban Perjalanan Dinas	17,115,947,455.00	15,129,647,663.00	5,981,514,293.00	38,227,109,411.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,224,623,000.00	320,440,790,985.00	-	321,665,413,985.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,005,347,783.00	520,295,599.00	2,829,363,295.00	5,355,006,677.00
Beban Penyisihan piutang tidak tertagih	(7,231,320.00)	21,000,000.00	-	13,768,680.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>67,041,925,638.00</b>	<b>634,298,559,087.00</b>	<b>38,320,719,115.00</b>	<b>739,661,203,840.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(49,592,178,107.00)</b>	<b>(634,196,504,154.00)</b>	<b>(36,551,635,668.00)</b>	<b>(720,340,317,929.00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-
Pendapatan pelepasan ases non lancar	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
Beban Pelepasan Aset non lancar	2,818,758,242.00	-	-	2,818,758,242.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	340,509,045.00	28,639,908,948.00	329,156,058.00	29,309,574,051.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,658,000.00	17,808,339,407.00	334,307,396.00	18,149,304,803.00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(2,799,172,913.00)</b>	<b>10,831,569,541.00</b>	<b>2,848,662.00</b>	<b>8,035,245,290.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(69,625,910,820.00)</b>	<b>(623,364,934,613.00)</b>	<b>(36,548,787,006.00)</b>	<b>(729,539,632,439.00)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KONSOLIDASI 018.2300  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2016 dan 30 JUNI 2015**

Uraian	DK	TP	KD	Total
Ekuitas Awal	7,664,836,723	6,574,618,693	30,863,592,489	45,103,047,905
Surplus / Defisit - LO	(599,225,770,481)	(584,295,342,286)	(36,505,422,626)	(1,220,026,535,393)
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	(417,336,939)	(418,848,527)	330,119,947	(506,065,519)
Penyesuaian Nilai Aset				
Koreksi Nilai Persediaan			5,499,000	5,499,000
Koreksi lain-lain			1	1
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(417,336,939)	(418,848,527)	330,119,946	(506,065,520.00)
Transaksi Antar Entitas	570,669,762,375	551,904,575,709	40,722,587,136	1,163,296,925,220
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	(28,973,345,045)	(32,809,615,104)	4,552,783,457	(57,230,176,692)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>(21,308,508,322)</b>	<b>(26,234,996,411)</b>	<b>35,416,375,946</b>	<b>(12,127,128,787)</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – NTB selaku Sekretariat UAPPAW Provinsi Nusa Tenggara Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BPTP-NTB) didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi di Era Otonomi Daerah. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian, BPTP-NTB bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Melalui peranan BPTP-NTB diharapkan mampu melakukan percepatan alih teknologi pertanian, mendukung pembangunan pertanian spesifik lokasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya penelitian pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

BPTP-NTB yang merupakan Kantor Wilayah Instansi Vertikal adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yaitu unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada Semester-1 Tahun 2016 ini, BPTP-NTB merupakan Sekretariat UAPPA-W dari 31 SATKER dari 10 unit Eselon dengan kode kewenangan DK/TP/KD. Perincian ke 31 SATKER tersebut adalah :

No.	KD Unit	KD Dekon	KD SATKER	Nm SATKER
1	03	DK	239071	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
2	03	TP	239126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
3	03	TP	239080	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat
4	03	TP	239082	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah
5	03	TP	239084	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur
6	03	TP	239093	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa
7	03	TP	239101	Dinas Kehutanan, Perkebunan & Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat
8	03	TP	239097	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu

No.	KD Unit	KD Dekon	KD SATKER	Nm SATKER
9	03	TP	239265	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bima
10	04	TP	230453	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bima
11	04	TP	230576	Dinas pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa
12	04	TP	235158	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram
13	04	DK	239009	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
14	04	TP	239037	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lombok Barat
15	04	TP	239127	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
16	04	TP	239253	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur
17	05	DK	239072	Dinas Perkebunan Prov Nusa Tenggara Barat
18	05	TP	239128	Dinas Perkebunan Prov Nusa Tenggara Barat
19	06	DK	239075	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
20	06	TP	239129	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
21	08	DK	239011	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
22	08	DK	239013	Dinas Perkebunan Prov Nusa Tenggara Barat
23	08	DK	239025	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24	08	TP	239133	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
25	08	TP	239134	Dinas Perkebunan Prov Nusa Tenggara Barat
26	08	TP	239135	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	09	KD	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
28	10	DK	239224	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. NTB
29	11	DK	239220	Badan Ketahanan Pangan Prov. NTB
30	12	KD	499471	Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram
31	12	KD	567741	Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sumbawa Besar

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode yang berakhir 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian - NTB. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan  2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp3000 (tiga ratus ribu rupiah);
    - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000 (sepuluh juta rupiah);
    - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas} bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Eselon-1	Kode Satker	Kew	Nama SATKER	2016	
					DIPA Awal	DIPA Revisi Terakhir
1	03	239071	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	17,567,141,000	16,730,862,000
2	03	239080	TP	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lombok Barat	25,911,720,000	11,871,761,000
3	03	239082	TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah	59,573,850,000	27,362,183,000
4	03	239084	TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Timur	33,033,770,000	19,290,064,000
5	03	239093	TP	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kab. Sumbawa	51,419,560,000	32,410,609,000
6	03	239097	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dompu	70,919,280,000	32,283,201,000
7	03	239101	TP	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kab. Sumbawa Barat	41,775,140,000	9,376,487,000
8	03	239126	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	66,820,185,000	132,643,064,000
9	03	239265	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Bima	83,873,030,000	40,265,624,000
10	04	239009	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	6,907,365,000	4,573,800,000
11	04	230453	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bima	65,771,500,000	57,725,524,000
12	04	230576	TP	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kab. Sumbawa	3,624,700,000	3,697,500,000
13	04	235158	TP	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram	3,905,200,000	3,525,000,000
14	04	239037	TP	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lombok Barat	3,336,340,000	3,400,000,000

Laporan Keuangan Tahunan TA 2016 - Konsolidasi DK/TP/KD

No	Eselon-1	Kode Satker	Kew	Nama SATKER	2016	
					DIPA Awal	DIPA Revisi Terakhir
15	04	239127	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	8,029,700,000	8,510,000,000
16	04	239253	TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Timur	22,346,540,000	20,143,180,000
17	05	239072	DK	Dinas Perkebunan Prov. Nusa Tenggara Barat	2,514,759,000	2,514,759,000
18	05	239128	TP	Dinas Perkebunan Prov. Nusa Tenggara Barat	84,535,014,000	31,250,239,000
19	06	239075	DK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Nusa Tenggara Barat	17,278,280,000	9,694,807,000
20	06	239129	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat	40,730,000,000	13,364,575,000
21	08	239011	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	14,548,070,000	18,645,390,000
22	08	239013	DK	Dinas Perkebunan Prov. Nusa Tenggara Barat	400,000,000	400,000,000
23	08	239025	DK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat	410,100,000	410,100,000
24	08	239133	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	322,915,640,000	276,870,315,000
25	08	239134	TP	Dinas Perkebunan Prov. Nusa Tenggara Barat	2,438,180,000	1,254,440,000
26	08	239135	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat	6,477,590,000	-
27	09	634040	KD	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB	25,214,879,000	24,236,605,000
28	10	239224	DK	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB	30,637,942,000	25,588,745,000
29	11	239220	DK	Badan Ketahanan Pangan Prov. NTB	15,321,824,000	8,890,643,000
30	12	499471	KD	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	12,677,760,000	13,269,322,000
31	12	567741	KD	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	7,413,597,000	7,545,343,000

## B.1 PENDAPATAN

Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1,273,265,000 dan Rp1,827,770,978. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per SATKER

Kode Satker	Penerimaan Negara bukan Pajak		%
	Estimasi	Realisasi	
239071	167,310,000	162,737,143	97.27%
239082	-	181,400,000	0.00%
239097	-	156,000,000	0.00%
239126		333,858,550	0.00%
239265	-	12,000,000	0.00%
239009	-	41,410,383	0.00%
239037	-	2,197,118	0.00%
239127	-	41,372,270	0.00%
239128	-	10,520,856,638	0.00%
239075	-	52,362,937	0.00%
239129	-	10,762,805	0.00%
239011	-	258,255,364	0.00%
239133	-	603,225,000	0.00%
634040	244,955,000	716,937,177	292.68%
239224	-	11,800,000	0.00%
239220	-	16,543,181	0.00%
499471	311,000,000	463,570,786	149.06%
567741	550,000,000	637,612,608	115.93%
<b>TOTAL</b>	<b>1,273,265,000</b>	<b>14,222,901,960</b>	<b>1117.04%</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp716,594,965,830.00 atau 83.56% dari anggaran belanja sebesar Rp857,330,372,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		16,353,890,000	16,318,734,871	99.79%
Belanja Barang		836,728,639,000	696,163,370,038	83.20%
Belanja Modal		4,247,843,000	4,112,860,921	96.82%
<b>Total Belanja Kotor</b>		<b>857,330,372,000</b>	<b>716,594,965,830</b>	<b>83.58%</b>

### B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 16,318,734,871.00 dan Rp 15,341,247,170.00. Realisasi belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 5.99% dari TA 2015. Nilai Belanja Pegawai merupakan nilai belanja dari SATKER dengan kode kewenangan KD (Kantor Daerah). Di tahun 2016, jumlah SATKER lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kode Kewenangan KD ada tiga SATKER yaitu 634040 untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, 499471 untuk Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, 567741 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15,728,839,343.00	14,914,535,970.00	-5.18%
Belanja Lembur	607,004,000.00	429,894,000.00	-29.18%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0.00	11,280,000.00	0.00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16,335,843,343.00</b>	<b>15,355,709,970.00</b>	<b>-6.00%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-17,108,472.00	-14,462,800.00	-15.46%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16,318,734,871.00</b>	<b>15,341,247,170.00</b>	<b>-5.99%</b>

## **C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

### **C.1 ASET LANCAR**

#### **C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 150,000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Nilai tersebut berasal dari Satker 230453 yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bima.

#### **C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3,307,775.00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### **C.1.3 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,307,775.00 dan Rp6,827,645.00. Nilai tersebut berasal dari Satker 499471 yaitu Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dan 567741 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

#### **C.1.4 PERSEDIAAN**

Saldo Persediaan untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8,655,607,847.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat..

## C.2 ASET TETAP

### C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7,441,891,940 dan Rp9,772,266,900. Dengan perincian sebagai berikut :

#### Perincian Aset Tanah

Kode Satker	Jumlah		%
	31 Desember 2016	31 Des 2015	
239072 DK	4,129,561,000	6,580,173,000	-59.34%
634040 KD	424,780,000	424,780,000	0.00%
499471 KD	2,639,407,040	2,519,170,000	4.56%
567741 KD	248,143,900	248,143,900	0.00%
Total	7,441,891,940	9,772,266,900	-31.31%

### C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp48,173,698,749.00.

### C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp34,074,020,215.00.

### C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 8,836,863,305.00.

### C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3,953,742,125.00.

### **C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp158,421,200.00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

### **C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-43,692,843,336.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

## **C.3 ASET LAINNYA**

### **C.3.1 ASET TAK BERWUJUD**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp207,410,672.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

### **C.3.2 ASET LAIN-LAIN**

Nilai Aset lain-lain yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8,045,791,384.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

### **C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA**

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-3,065,446,118.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

#### **C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

##### **C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30,537,894,527.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

##### **C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN pada SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,771,500,000 dan Rp18,530,000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### **C.5 EKUITAS**

##### **C.5.1 EKUITAS**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 49,846,992,855.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## **D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA**

Jumlah Pendapatan Konsolidasi untuk Unit Eselon SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2,051,188,735.00.

### **D.2 BEBAN PEGAWAI**

Jumlah Beban Pegawai Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16,367,096,471.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### **D.3 BEBAN PERSEDIAAN**

Jumlah Beban Persediaan Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-152,050,696.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### **D.4 BEBAN BARANG DAN JASA**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp356,080,452,842.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

#### **D.5 BEBAN PEMELIHARAAN**

Jumlah Beban Pemeliharaan Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2,104,406,470.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### **D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp38,227,109,411.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

#### **D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp321,665,413,985.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5,355,006,677.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

#### **D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasi untuk SATKER Kementerian Pertanian dengan kode kewenangan DK/TP/KD di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar –Rp8,035,245,290.00.

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

## **E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp45,103,047,905.00.

### **E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-1,220,026,535,393.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.-506,065,519.00.

### **E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5,499,000.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

### **E.5 PENYESUAIAN NILAI ASET**

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

### **E.6 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1,163,296,925,220.00.

### **E.7 EKUITAS AKHIR**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12,127,128,787.00.

## F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Di akhir tahun 2016, ada beberapa SATKER yang memiliki Tunda bayar sebesar Rp.30,411,009,854.00 pada supplier pengadaan benih. Tunda bayar terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran saat kontrak pengadaan benih telah dilakukan dan benih untuk masyarakat sudah di serahkan.

No	Kode Satker	Nama SATKER	Nilai
1	03.239126.TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	14,257,633,004
2	03.239093.TP	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kab. Sumbawa	5,354,662,500
3	03.239265.TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Bima	8,532,109,350
4	03.239080.TP	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lombok Barat	658,425,000
5	03.239082.TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah	1,608,180,000
Total			30,411,009,854

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lain-lain pada akhir tahun 2016 ini.